

KATA PENGANTAR

Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun (tahun 2022) dengan berpedoman pada RENSTRA 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Barat 2021-2026.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disamping itu Renja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Kuala Tungkal, Januari 2022

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT**

H E N R I Z A L, S.Pt, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 19710911 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum.....	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika	
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Ssebelumnya dan Capaian Renstra OPD	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Inovasi perangkat daerah	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL :

- **TABEL I (T-C.29)** : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
- **TABEL II (T-C.28)** : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- **TABEL III (T-C.33)** : RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- **TABEL IV** : USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
- **TABEL V (T-C.27)** : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- **TABEL VI** : HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana tahunan pembangunan yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana kerja (Renja) OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi dan program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan arahan dan kebijakan operasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, Rencana kerja (Renja) OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan dapat direalisasikan.

Mengingat arti pentingnya dokumen Rencana kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana kerja (Renja) 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 40);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022,

1.4 SISTEMATIKA

Adapun Rencana kerja (Renja) Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

-

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 terhadap capaian renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022. Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel I (T-C.29) berikut :

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.28 Capaian IKPD berikut :

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk mempertahankan indeks kepuasan layanan terhadap pimpinan dan anggota guna mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan berbasis produktifitas aparatur. Hal ini terlihat di kolom target tahun berjalan sampai dengan tahun berikutnya, Sekretariat DPRD selalu menargetkan jumlah layanan setiap tahunnya. Untuk realisasi tahun berjalan belum biasa diukur dikarenakan belum habis masa satu tahun dalam periode tahun anggaran 2022.

2. Persentase fasilitasi Pembahasan Rancangan Perda yang diajukan.

Faktor pendorong indikator terhadap fasilitasi Pembahasan Rancangan Perda yang diajukan tersebut adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda. Untuk target yang ditetapkan dari 100% Raperda yang diajukan, telah tercapai 100% pada tahun 2022.

3. Persentase aspirasi masyarakat (POKIR) yang dihimpun.

Indikator Kinerja Aspirasi Masyarakat (POKIR) yang dihimpun tersebut merupakan konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan. Indikator tersebut perlu disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi dan peningkatan koordinasi sehingga kegiatan aspirasi dapat terlaksana dengan sempurna mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Adanya penambahan kebutuhan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

Tabel T-C.33

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi selaku pemberi pelayanan terhadap tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD, Sekretariat DPRD hanya sebatas memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk melakukan pertemuan/hearing bersama dengan masyarakat kepada bidang/komisi yang menangani tentang permasalahan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

Tabel IV : 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.5 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Tersedianya aplikasi digital yang dapat mendokumentasikan / menghimpun pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, aplikasi tersebut tergabung kedalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang mana setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan akses atau User untuk menginput aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD tersebut.
2. Dibuatnya Website Khusus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga menjadikan Sekretariat dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin membumi dimata masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harapanya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar Penyelenggaraan Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kab. Tanjab Barat pada tahun 2022 merupakan OPD Pendukung dan tidak terkait langsung dengan kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2022) . Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi rapat-rapat pimpinan dan anggota DPRD;
3. Meningkatnya pelayanan Fasilitasi Keluhan dan aspirasi Masyarakat,

Sesuai Dengan tujuan Renja yang dikemukakan diatas, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.
2. Meningkatnya progam legislasi daerah dan pembahasan Raperda yang akan ditetapkan
3. Meningkatnya kegiatan Penjaringan aspirasi masyarakat (Reses)

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2022****4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitas Fraksi DPRD
 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitas penyusunan Penjelasan / Keterangan dan atau Naskah Akademik
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - Pembahasan APBD

- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 4. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan Reses
- 5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali dapat dilihat pada table V (T-C. 27) berikut ini :

TABEL VI

**Tabel : Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Hasil Analisis Kebutuhan 2023 (permendagri 90 tahun 2019 kepmendagri 050- 3708 : pemutakhiran)					
Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan dana	Catatan penting
-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD		Berjalannya pelayanan dan administrasi DPRD	100%	35.619.899.949	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ	117 buku	73.535.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ	117 Buku	73.535.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tanjung Barat	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.752.848.683	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanjung Barat	Jumlah dokumen laporan keuangan	12 Bulan	3.895.970.683	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tanjung Barat	Tersedianya Administrasi Keuangan	12 Bulan	856.878.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tanjung Barat	Tersedianya Administrasi Kepegawaian	100%	875.348.750	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tanjung Barat	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	418 Stell	738.004.950	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Tanjung Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	34 Orang	137.343.800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tanjung Barat	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	100%	1.426.365.215	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tanjung Barat	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor	100%	115.829.440,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanjung Barat	Tersedianya alat tulis kantor	100%	260.411.389	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tanjung Barat	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	168.925.386	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tanjung Barat	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	207.352.200	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tanjung Barat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	77100eks/1 2 bln	488.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanjung Barat	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat	44 OK	185.446.800	

RENCANA KERJA | 2022

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tanjab Barat	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	100%	1.186.043.765	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tanjab Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	21 unit/12 Bln	705.069.040	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanjab Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	120.000.000	
Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab Tanjab Barat	Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	360.974.725	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanjab Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	12 bln	1.370.990.677	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tanjab Barat	Tersedianya jasa surat menyurat	1100lbr/12 bln	13.365.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tanjab Barat	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 Bulan	484.035.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianyajasadanalatkebersihankantor	12 Bulan	873.590.477	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanjab Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	100%	3.236.659.040	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanjab Barat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	38 unit/12 bln	634.535.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanjab Barat	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	27 unit/12 bln	420.944.040	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tanjab Barat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan	14 unit/12 bln	2.181.180.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab Tanjab Barat	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		-	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab Tanjab Barat	Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bln	20.008.749.804	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Tanjab Barat	Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	12 bln	20.008.749.804	
Layanan Administrasi DPRD	Kab Tanjab Barat	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	12 bln	2.689.359.015	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab Tanjab Barat	Jumlah dokumen risalah rapat	120 buku	486.436.500	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Luar daerah	Jumlah rapat rapat DPRD	120 kali	1.877.977.683	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Tanjab Barat	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan	2 Paket/12bln	324.944.832	

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Tanjab Barat	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan		20.102.221.317	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Tanjab Barat	Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD	100%	4.979.002.283	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Propem Perda yang dibahas	14 Perda	916.012.500	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Raperda yang dibahas	14 Perda	3.213.557.200	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas	14 Perda	393.495.083	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Naskah Akademik yang dibahas	14 Perda	455.937.500	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjab Barat	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	1.553.770.500	
Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen KUA PPAS	1 Laporan/Bln	10.692.000	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Laporan/Bln	10.692.000	
Pembahasan APBD	Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen APBD	1 Laporan/Bln	492.712.000	
Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen APBD Perubahan	1 Laporan/Bln	280.962.000	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Luar Daerah	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	1 Laporan/Bln	758.712.500	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjab Barat	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	1.804.961.625	
Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Tanjab Barat	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	35 org	920.000.000	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah data dan dokumentasi	1000 kali/12 bln	884.961.625	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	1.811.003.850	
Pelaksanaan Reses	Kecamatan	Frekuensi reses yang dilaksanakan	3 kali	1.811.003.850	
Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100%	9.953.483.059	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Tanjab Barat	frekuensi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam /luardaerah	782 kali/12 bln	9.953.483.059	
				55.722.121.266,-	

BAB V
PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat dilaksanakan.

Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Sekretariat DPRD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan APBD Sekretariat DPRD tahun anggaran 2022. Terima Kasih.

Tungkal, Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

HENRIZAL, S.Pt, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710911 199803 1 004